

Pengantar:
Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH.,MH
(Guru Besar Hukum Pajak Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin)

Reformasi PENGADILAN PAJAK di Indonesia



DR. ISMAIL RUMADAN, MH.

Pengantar

Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, SH.,MH

(Guru Besar Hukum Pajak Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin)

Reformasi PENGADILAN PAJAK Di Indonesia

DR. ISMAIL RUMADAN, MH.



literasi
nusantara

REFORMASI PENGADILAN PAJAK

Di Indonesia

Penulis : DR. ISMAIL RUMADAN, MH.

ISBN : 978-623-7125-41-9

Copyright © Agustus 2020

Ukuran: 15.5 cm X 23 cm ; Hal: x + 120

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh **Literasi Nusantara**. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Lay Out : Moh. Faizal Arifin

Cover : Ahmad Ariyanto

Cetakan I, Agustus 2020

Diterbitkan pertama kali oleh Literasi Nusantara

Perum Paradiso Kav A1 Junrejo - Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web : www.penerbitlitnus.com

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi

Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163

Telp : +6285234830895

Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com



Reformasi PENGADILAN PAJAK di Indonesia

Eksistensi Pengadilan Pajak saat ini masih menuai kritik dari berbagai pihak karena Pengadilan Pajak seringkali menjadi fokus penyalahgunaan wewenang, *rent-seeking* dan kebijakan elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang, hal ini tentu tidak *balance* dengan harapan dan realita semangat masyarakat untuk mewujudkan pembaharuan hukum peradilan di Indonesia terkait dengan eksistensi Pengadilan Pajak tersebut sebagai lembaga peradilan yang mandiri, berwenang dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Permasalahan yang sangat mendasar saat ini adalah Pengadilan Pajak merupakan institusi di bawah “dua atap”, dimana pembinaan teknis peradilan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Posisi semacam ini menyiratkan ketidakmandirian dan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan politik hukum peradilan satu atap dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu langkah yang tepat dilakukan saat ini adalah mereformasi Pengadilan Pajak melalui penyempurnaan UU Nomor 14 Tahun 2002 untuk mewujudkan Pengadilan Pajak menjadi badan peradilan yang independen berada di bawah Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia



DR. ISMAIL RUMADAN, adalah Peneliti Hukum dan Peradilan pada Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumni program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2009 ini tercatat juga sebagai dosen/tenaga pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Nasional, Program Pascasarja Universitas Nasional dan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta. Aktifitas utama yang menjadi kesibukan sehari-hari penulis adalah melakukan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan peradilan. Kemudian mengajar di beberapa perguruan tinggi. Kemudian aktif dalam organisasi profesi hukum maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.



Pusatlitbang
Hukum dan Peradilan MA RI



literasi
nusantara

literasi nusantara
Perum Paradiso Kav A1 Junrejo - Batu
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
0812-3602-3633

Hukum

U+17

ISBN 978-623-6508-35-0

